

BAB VI

PENUTUP

A. Simpulan

Pemberitaan politik di media cetak nasional, yaitu Kompas, Jawa Pos, Republika dan Media Indonesia, memiliki peran yang cukup penting bagi proses demokratisasi. Tidak dipungkiri bahwa media massa termasuk media cetak merupakan pilar penting bagi demokrasi, karena dengan media massa ini partisipasi politik masyarakat dapat didorong secara optimal. Peristiwa politik pasca reformasi 1998 yang sangat penting adalah dilaksanakannya pemilihan presiden dan wakil presiden secara langsung untuk pertama kalinya di Indonesia tahun 2004. Fungsi normatif pers untuk memberi informasi dan pendidikan politik sekaligus kontrol politik bagi masyarakat, pemerintah dan kontestan politik dalam peristiwa pergantian kepemimpinan nasional ini dapat diwujudkan manakala media massa ini melakukan aktivitasnya disertai dengan rasa tanggungjawab dan penuh dengan sikap etika.

Kaitannya dengan hal tersebut, kajian tentang etika pemberitaan politik memiliki nilai yang cukup signifikan dalam kerangka membangun masyarakat yang demokratis. Dari hasil kajian terhadap empat media cetak nasional, maka dapat disimpulkan tentang deskripsi etika pemberitaan politik media cetak nasional dalam peristiwa pemilihan presiden dan wakil presiden 2004 tersebut.

1. Media cetak nasional menjadi bagian yang tak terpisahkan dari masyarakatnya, oleh karena itu etika pemberitaan yang dilakukannya tidak lepas dari situasi sosial politik negara. Dari teks pemberitaan politik menunjukkan performen media cetak nasional telah cukup berkualitas, dengan memperhatikan kaidah-kaidah obyektivitas yang merupakan indikasi nilai-nilai etika seperti kejujuran, keadilan, kebenaran, kebijaksanaan dan sebagainya. Masing-masing media memiliki gradasi kualitas yang berbeda-beda dalam memproduksi pemberitaan politik. Hal ini dipengaruhi oleh

beberapa hal seperti proses produksi dalam ruang redaksi dan faktor ektramedia yaitu masyarakat, sistem politik, budaya dan sebagainya. Tinjauan terhadap pemberitaan politik media cetak nasional ini menunjukkan bahwa nilai-nilai etika, terutama etika pemberitaan dan media massa merupakan hasil negosiasi dan kompromi dari nilai-nilai idealis dengan nilai-nilai pragmatis, antara ideologi media, kepentingan media dan kepentingan khalayak. Namun demikian pengaruh kepentingan media sendiri terhadap masyarakat terlihat lebih dominan dibandingkan kepentingan masyarakat terhadap media.

2. Pada umumnya sistem etika Islam bersifat personal, yakni berhubungan dengan kualitas diri individual dan kondisi jiwa personal tetapi memiliki implikasi sosial. Dalam konteks media cetak nasional, wujud etika ditentukan oleh “jiwa” media itu sendiri yaitu para pelaku media cetak. Para pelaku inilah menjalankan aktivitas-aktivitas pemberitaan sesuai dengan ideologi yang bangun bersama dalam insititusi media. Pelaku media yang terbiasa memahami dan komitmen terhadap nilai-nilai dalam profesinya akan mudah untuk bertindak sesuai dengan nilai-nilai tersebut. “Jiwa” media yang sehat dan baik akan menghasilkan “suara hati” media yang juga baik dan luhur. Suara hati ini akan menunjukkan bahwa sesuatu perbuatan yang baik harus dilakukan karena memang perbuatan itu baik dan utama; dan perbuatan harus ditinggalkan karena perbuatan tersebut buruk dan rusak. etika pemberitaan ini dalam tinjauan Islam adalah kesadaran moral yang berangkat dari dalam diri, bertolak dari kondisi jiwa yang terbentuk menjadi mentalitas etika. Bisa saja, seseorang berbuat “baik” dalam pengertian tidak melanggar norma masyarakat, tetapi sikap itu bisa jadi hanya berupa sebuah “disiplin sosial” yang dilakukan dengan pertimbangan-pertimbangan keuntungan-keuntungan atau kepentingan tertentu yang sekular. Hal ini akan berbeda dengan sikap yang muncul dari dalam jiwa, ia akan hadir dalam kondisi bagaimanapun dan menuntut untuk dilaksanakan, terlepas dalam kesaksian orang lain maupun tidak, karena kesaksian bagi jiwa cukup diyakini selalu hadir dari Tuhan yang Maha Mengetahui (*muraqabah*).

Nilai-nilai akhlak sebagaimana dalam ajaran Islam sebenarnya linear dengan etika yang dituntutkan dalam pemberitaan, termasuk pemberitaan politik, di media cetak. Nilai-nilai seperti keadilan, kejujuran, kebenaran yang menjadi sikap hidup para pelaku media akan dapat menjamin keberlangsungan partisipasi sosial dan politik masyarakat. Di sinilah fungsi pemberitaan politik untuk menyampaikan informasi-informasi tentang situasi masyarakat, citra personal dan struktur politik mendapat posisi yang sangat penting. Tidak sekedar memberi informasi, posisi pemberitaan politik lebih khusus lagi sangat berperan dalam memberi preferensi bagi masyarakat untuk berpendapat terkait diri mereka dalam bentuk opini publik atau pendapat umum, sehingga memperteguh dan menguatkan predisposisi keyakinan atau sikap politik masyarakat. Peranan-peranan normatif tersebut dengan sendirinya menjadi kewajiban bagi media cetak untuk diwujudkan dalam masyarakat demokratis.

B. Saran dan Penutup

Pada umumnya media massa yang besar memiliki standar perilaku sebagai pengejawantahan nilai-nilai jurnalisme dan etika yang dianutnya. Etika pemberitaan, termasuk pemberitaan politik, sudah semestinya menjadi kesadaran personal para pelaku media yang dibangun melalui penghayatan atas nilai-nilai yang berkembang di masyarakat, khususnya nilai-nilai dari ajaran agama. Pengamalan dan penghayatan terhadap ajaran agama menjadi penting untuk membangun kesadaran etika religius, di mana kesadaran inilah yang dapat menjadi faktor utama terwujudnya sikap-sikap moral, termasuk dalam aktivitas di media massa.

Namun biasanya membangun kesadaran etika tersebut merupakan pekerjaan yang paling sulit, oleh karena itu dalam membentuk “jiwa” dan mendidik kesadaran etika ini dapat dilakukan di level normatif berupa pemaksaan perintah dan larangan. Level normatif ini dapat berbentuk kode etik, kode perilaku, maupun hukum yang mengikat dan memaksa para pelaku media untuk

menaati norma-norma etika dalam pemberitaan. Dalam konteks Indonesia, pada level hukum negara telah membuat undang-undang yaitu UU no.40 tahun 1999 tentang Pers dan Dewan Pers sebagai bentuk normatif politis bagi aktivitas media massa. Selain itu, organisasi profesi juga pada umumnya menerapkan aturan normatif perilaku dalam bentuk kode etik atau kode perilaku. Norma-norma ini akan efektif dalam menjamin terwujudnya perilaku yang profesional dan moral dari pelaku media manakala ada badan yang berwenang untuk melakukan pengawasan pelaksanaan norma tersebut. Koran Jawa Pos dan (dulu) majalah Pantau Jakarta memiliki lembaga Ombudsmen yang mengawasi dan melakukan penilaian terhadap kinerja dan kualitas pemberitaan wartawannya, termasuk memberi sanksi.

Meskipun negara memiliki kewenangan untuk mengatur perikehidupan masyarakatnya, tetapi negara hendaknya tidak melakukan pengekan terhadap kebebasan media massa. Dalam masyarakat yang demokratis keberadaan media massa mutlak diperlukan sebagai media komunikasi dan interaksi antar warga, mediator kepentingan dalam masyarakat dan fungsi distribusi informasi yang diperlukan masyarakat untuk mengambil keputusan dan sikap politik. Aturan yang dilakukan negara bukan untuk mengekang kebebasan, melainkan menjamin media massa dapat menjalankan fungsinya melayani masyarakat, memenuhi hak tahu, hak informasi bagi masyarakat. Pemenuhan hak masyarakat oleh media massa hanya akan terwujud jika media massa memiliki rasa tanggungjawab sosial dan memegang teguh etika.

Rosihan Anwar dalam buku biografinya menyatakan: "...Jika pers mementingkan kebebasan dia akan kehilangan sentuhannya dengan masyarakat ramai dan berdiri dalam isolasi, pengucilan, paling banter dia seorang Don Kisot. Pada sisi ekstrim lain terdapat penyerahan hina-dina kepada doktrin resmi pemerintah yang berkuasa, dan di situ dia kembali terkucil dari khalayak..." (Sudibyo, 1999 : 64)

Dengan demikian segala aktivitas media pada intinya adalah berorientasi pada masyarakat. Masyarakat sebagai pengguna media juga harus meningkatkan

daya kritisnya dalam melihat media massa. Media massa sering dipandang sebagai anjing penjaga bagi masyarakat, tetapi juga sebaliknya masyarakat perlu mengawasi perilaku media agar tetap profesional dan bermoral, misalnya dengan membentuk lembaga *media watch* atau lembaga pengawas media. Masyarakat yang melek baca (*literate society*) akan dapat melakukan seleksi, kritis dan pembacaan informasi di media massa secara lebih baik sehingga mampu menerapkannya dalam penentuan sikap sosial dan politiknya secara bijaksana.

Wallahu 'Alam bi ash-Shawab.